



# **RENCANA STRATEGIS**

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **TAHUN 2019 - 2024**



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024.**

### Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Bab VIII Penutup.

### Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

j. Badan

- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
- l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
- m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
- n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
- o. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
- p. Dinas Pendidikan;
- q. Dinas Kesehatan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- s. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
- t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- u. Dinas Sosial;
- v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- x. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- y. Dinas Lingkungan Hidup;
- z. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- hh. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ii. Dinas Perkebunan;
- jj. Dinas Peternakan;
- kk. Dinas Kehutanan;
- ll. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- mm. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- nn. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- oo. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
- pp. Biro Hukum;

- qq. Biro Perekonomian;
- rr. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan;
- tt. Biro Organisasi;
- uu. Biro Umum;
- vv. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- ww. Sekretariat DPRD;
- xx. Satuan Polisi Pamong Praja;
- yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
- zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
- aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan
- ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

#### Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 September 2019

  
KHOFIEAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 September 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum



JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 52 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
- l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
- m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
- n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
- o. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
- p. Dinas Pendidikan;
- q. Dinas Kesehatan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- s. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- u. Dinas Sosial;
- v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- x. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- y. Dinas Lingkungan Hidup;
- z. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- hh. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ii. Dinas Perkebunan;
- jj. Dinas Peternakan;
- kk. Dinas Kehutanan;
- ll. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- mm. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- nn. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- oo. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
- pp. Biro Hukum;
- qq. Biro Perekonomian;
- rr. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan;
- tt. Biro Organisasi;
- uu. Biro Umum;
- vv. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- ww. Sekretariat DPRD;
- xx. Satuan Polisi Pamong Praja;
- yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
- zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
- aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan
- ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 tersebut dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.



GUBERNUR JAWA TIMUR

*[Handwritten signature]*  
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

## Kata Pengantar



Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan sistematisa penyusunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra ini juga disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang memuat Visi, Misi, Program Prioritas, dan Nawa Bhakti Satya Kepala Daerah terpilih.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 5 (lima) tahunan guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Bapenda Provinsi Jawa Timur secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Semoga dokumen Renstra periode 2019-2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH. M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 198603 1 026

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	Hal. ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	22
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	25
3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	40
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	42
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	45
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	68
<b>BAB VIII : PENUTUP</b>	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS Bapenda Provinsi Jawa Timur	15
Tabel 2.2	indikator Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	17
Tabel 2.3	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan	62
Tabel 2.4	Program/kegiatan Berdasarkan Kebutuhan dari Pemangku Kepentingan	20
Tabel 3.1	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan	31
Tabel 3.2	Permasalahan pelayanan Bapenda provinsi Jawa Timur	35
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan	41
Tabel 5.1	Tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan	42
Tabel 6.1	Rencana program dan kegiatan serta pendanaan	46
Tabel 6.2	Program Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendukung Nawa Bhakti	67
Tabel 7.1	Indikator kinerja perangkat daerah	69

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses penyusunan langkah-langkah sistematis berdasarkan analisa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah Kepala Daerah terpilih. RPJMD merupakan penjabaran manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan agenda pembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen tersebut juga digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, ikut menyusun dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yaitu Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas, merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan anggaran yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu, “***Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil,***



***Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong “.*** Melalui implementasi Misi ke-3, yaitu : ***“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan”***

Secara umum fungsi Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro perangkat daerah yang dijadikan pedoman dalam hal:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan masa perencanaan pada Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Bapenda Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Bapenda Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Bapenda Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparaturnya Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renja Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Perencanaan Anggaran berjalan (Tahun 2019-2024);
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bapenda Provinsi Jawa Timur, merupakan pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur. Dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fungsi Pemungutan PAD tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

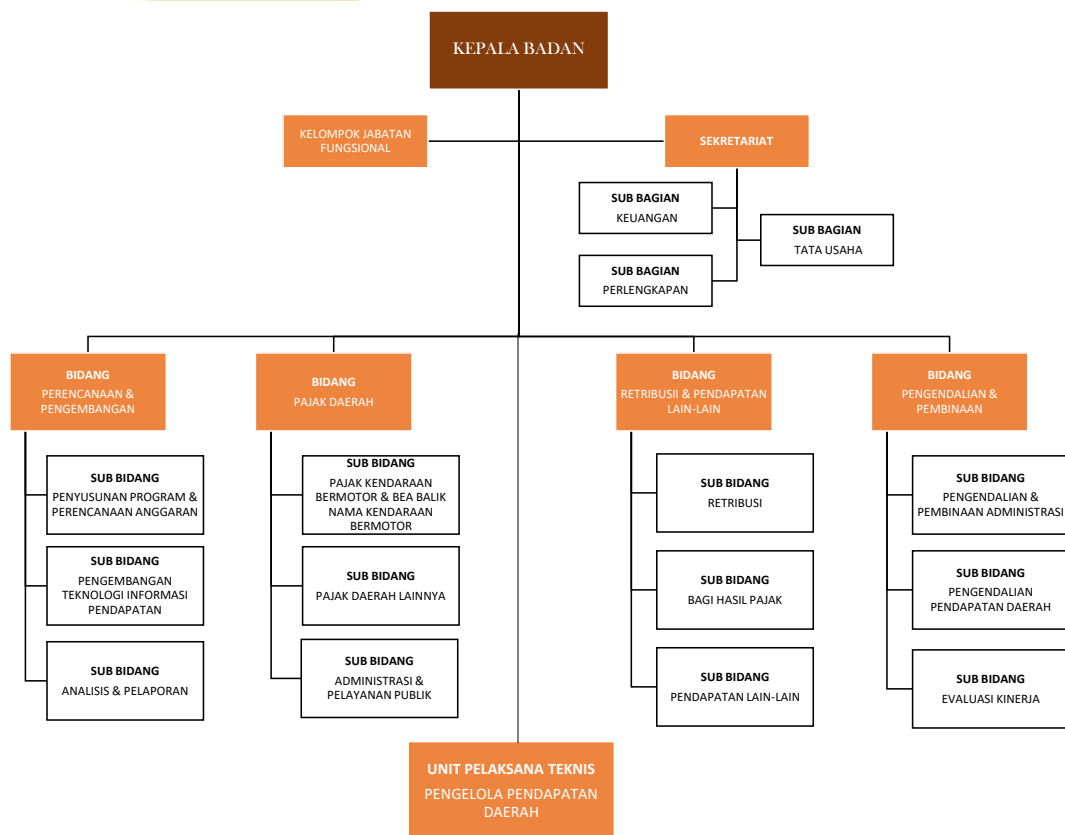
Besaran struktur organisasi yang dibentuk berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, terdiri dari 4 Bidang dan 1 Sekretariat sebagai berikut:

1. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Perlengkapan
  - c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan:
  - a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran
  - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan
  - c. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan;
3. Bidang Pajak Daerah:
  - a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
  - c. Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain :
  - a. Sub Bidang Retribusi
  - b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
  - c. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan :
  - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi
  - b. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
  - c. Sub Bidang Evaluasi Kinerja
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Pendataan
  - c. Sub Bagian Pembayaran
7. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**



Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit pada Bapenda Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretaris bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai bertugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisa dan pelaporan data pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan perencanaan pendapatan dan belanja serta pengembangan sistem/teknologi informasi bidang pendapatan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
  - d. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - e. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian sistem informasi pendapatan;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - g. Pelaksanaan penyusunan konsep perjanjian kerjasama dan produk hukum lainnya;
  - h. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
3. Kepala Bidang Pajak Daerah bertugas melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, pembayaran, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang pajak daerah;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pelayanan dan keberatan pajak daerah (doleansi);
  - d. Perumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak daerah;
  - e. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak daerah;
  - f. Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah (doleansi) dan pengaduan pelayanan;
  - g. Pengoordinasian kebijakan pajak daerah dengan instansi terkait;
  - h. Pelaksanaan penyusunan kajian pemungutan pajak daerah;
  - i. Perumusan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah pada tahun berjalan;
  - j. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah;
  - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pelayanan publik dan pemungutan pajak daerah; dan
  - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain bertugas melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah, penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta pendapatan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendapatan Lain-Lain, mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring, klarifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak, bukan pajak, serta pendapatan lain-lain;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak, bukan pajak serta pendapatan lain-lain;

- e. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan piutang retribusi daerah;
  - f. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait target dan tarif retribusi daerah;
  - g. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan objek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan pendapatan lain-lain;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait bagi hasil pajak/bukan pajak;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan, bertugas melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan internal, meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan barang dan pegawai dengan rincian tugas sebagai berikut;
- a. Perumusan kebijakan bidang pengendalian dan pembinaan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
  - d. Pelaksanaan pengendalian meliputi teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
  - e. Pelaksanaan pengendalian administrasi keuangan, barang, pegawai dan teknologi informasi;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan pengawas eksternal;
  - g. Pelaksanaan evaluasi kinerja Badan;
  - h. Penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi;
  - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran;
  - j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat dengan fungsi diantaranya:
  - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis UPT;
  - b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD;
  - c. Pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB pada KB. SAMSAT;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada KB. SAMSAT;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan PAD;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Gambar 2.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah didukung oleh ketersediaan sumber daya sebagai berikut :

### 1. Sumber Daya Manusia/Aparatur :

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia/Aparatur dengan jumlah 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 700 (tujuh ratus ) orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) orang (Data tercatat sampai dengan tanggal 2 Januari 2019).

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**(Berdasarkan Golongan Ruang)**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda ( IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I ( IV/b)	9
3	Pembina (IV/a)	54
4	Penata Tingkat I ( III/d)	98
5	Penata ( III/c)	81
6	Penata Muda Tingkat I ( III/b)	115
7	Penata Muda (III/a)	55
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	25
9	Pengatur (II/c)	199
10	Pengatur Muda Tingkat I ( II/b)	26
11	Pengatur Muda (II/a)	17
12	Juru Tingkat I ( I/d)	-
13	Juru ( I/c)	20
14	Juru Muda Tingkat I ( I/b)	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>700</b>

(Data: per Januari 2019)

2. Asset/Modal :

Sampai dengan tahun akhir Tahun Anggaran 2018 aset tetap yang status penggunaannya ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah 67.929 aset, dengan nilai sebesar Rp 513.328.268.751,00, terdiri atas: golongan tanah, golongan peralatan dan mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi dan jaringan, golongan aset tetap lainnya, serta golongan konstruksi dalam pekerjaan. Komposisi aset golongan gedung dan bangunan diantaranya adalah 1 kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 35 Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan 48 Kantor

Bersama Samsat dengan lokasi tersebar di seluruh Jawa Timur, sedangkan aset jenis alat angkutan terdiri atas kendaraan operasional roda 4 maupun roda 2 sebanyak 971 unit, dengan nilai sebesar Rp 36.700.609.568,00

### 3. Unit Operasional Pelayanan :

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat dibantu oleh 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah pada 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, 46 (empat puluh enam) Kantor Bersama Samsat Induk dan 2 (dua) Samsat Kepulauan, 25 (dua puluh lima) Pelayanan Samsat Drive Thru, 85 (delapan puluh lima) Pelayanan Samsat Payment Point, 11 (sebelas) Pelayanan Samsat Corner, 65 (enam puluh lima) unit Pelayanan Samsat Keliling, 1 (satu) Bus Samsat Keliling, dan Layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) Pos hasil kerjasama dengan PT. Pos Indonesia di seluruh wilayah Jawa Timur, memanfaatkan kantor pos di Jawa Timur untuk pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penyediaan layanan bukan hanya outlet layanan berbasis lokasi, akan tetapi juga disediakan layanan *self service*, dengan cara melakukan akses pada alamat web: [www.e-samsat.jatimprov.go.id](http://www.e-samsat.jatimprov.go.id) dengan keuntungan dapat dilakukan setiap saat dan dari mana saja.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (sesuai Renstra Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019) memiliki sasaran strategis sebagai berikut;

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2018 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Jawa Timur**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKD	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)	-	8.951	12.776	12.922	12.425	12.656	12.564	12.847	14.412	15.104	8.611	140,4%	100,6%	111,5%	121,6%	68,0%
		Persentase Kenaikan Penerimaan PAD		4,72%	5,80%	8,76%	4,00%	1,86%	8,51%	2,21%	12,34%	4,80%		80,3%	-61,9%	40,9%	20,0%	0,0%
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak		88,00%	88,00%	86,00%	86,00%	86,00%	88,77%	87,88%	88,37%	89,31%		0,9%	-0,1%	2,8%	3,8%	0,0%
		Rata-rata Nilai SKM		88,00	88,00	86,00	86,00	86,00	88,99	87,28	86,84	88,06		1,1%	-0,8%	1,0%	2,4%	0,0%
		Persentase WP pengguna Layanan Samsat Unggulan		43,00%	43,00%	43,00%	52,00%	52,00%	52,76%	49,49%	51,41%	58,44%		22,7%	15,1%	19,6%	12,4%	0,0%



Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian Kinerja Pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan PAD disebabkan kondisi yang terjadi pada penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah dari kendaraan bermotor, sebagai berikut:
  - a. Pajak Kendaran Bermotor, merupakan Pajak Langsung dan sifatnya berkala, sehingga penerimaannya dapat diprediksi berdasarkan jumlah objek pajak terdaftar dan asumsi perubahannya, adakalanya prediksi tersebut tidak akurat karena kebijakan yang secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti insentif/keringanan Pajak Daerah. Hal tersebut berdampak pada pelampauan penerimaan PKB yang targetnya dihitung tanpa memperhatikan kebijakan insentif Pajak Daerah;
  - b. Tren jumlah penjualan kendaraan baru di wilayah Jawa Timur cenderung semakin turun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang relatif sulit untuk diprediksi. BBNKB tersebut merupakan jenis pajak tidak langsung, dimana pemungutannya bergantung dari aktivitas yang mengakibatkan munculnya kewajiban membayar pajak, dalam hal ini adalah peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Besar kecilnya peralihan tersebut sangat erat kaitannya dengan tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, yang pembentukan harganya sangat bergantung pada nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, tingkat suku bunga dan fluktuasi harga jual bahan bakar minyak;
2. Indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, diukur dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak yang melakukan penelitian ulang dan jumlah wajib penelitian ulang. Berdasarkan data di atas capaiannya berada dalam rentang 88 s/d 89% dan rata-rata rasio capaian 1,8%. Upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan yang kepada masyarakat dan mengintensifkan sosialisasi kebijakan perpajakan melalui berbagai media, serta pelaksanaan operasi gabungan untuk menjaring wajib pajak tidak patuh;
3. Indikator Rata-rata Nilai SKM capaiannya berada dalam rentang nilai 86 hingga 88, dan rata-rata rasio capaian sangat kecil yaitu 0,9%. Penilaian atas layanan tersebut

dilaksanakan di masing-masing Kantor Bersama Samsat dengan memperhatikan kaidah penilaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

4. Indikator Persentase WP Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan, diukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap pengembangan layanan Samsat Unggulan. Berdasarkan data diatas berdasarkan data persentasenya selalu meningkat dan mendekati angka 60%, sedangkan rata-rata rasio capaian mencapai 17,4% hal ini disebabkan karena tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan layanan Samsat Unggulan yang terbukti dapat memecah konsentrasi pelayanan pada KB. SAMSAT Induk.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
		1	3	4	5	6	8	9	10	11		13	14	15	16		17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.266.315.399	68.116.361.050	70.464.208.175	66.158.369.801	65.137.345.463	51.703.436.866	62.483.360.299	62.773.031.078	63.031.420.807		86%	92%	89%	95%		66.028.519.978	59.997.812.263
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.588.560.180	70.800.615.511	77.643.814.028	46.826.427.482	39.031.054.450	64.302.597.996	64.327.816.147	70.451.531.083	41.943.929.314		81%	91%	91%	90%		62.778.094.330	60.256.468.635
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	36.907.602.000	15.549.492.000	17.547.219.000	-	-	32.250.600.713	11.263.996.766	14.282.115.813	-		87%	72%	81%	0%		14.000.862.600	14.449.178.323
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	-	11.955.057.729	11.075.382.024	-	-	-	10.096.864.436		0%	0%	0%	84%		4.606.087.951	2.524.216.109
5	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.283.837.500	1.426.617.000	1.712.617.000	1.330.149.000	1.281.217.000	907.414.840	1.122.434.675	1.547.978.097	1.079.293.799		71%	79%	90%	81%		1.406.887.500	1.164.280.353
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	81.565.575.481	41.276.251.300	36.013.549.627	-	-	68.948.173.360	38.651.403.661	34.264.463.511	-		47%	83%	0%	0%		31.771.075.282	28.372.808.106

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
		3	4	5	6		8	9	10	11		13	14	15	16		17	18
7	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	1.792.290.000	2.167.450.000	-	-	-	1.630.202.700		0%	0%	0%	91%		1.979.870.000	1.630.202.700
8	Program Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	3.349.470.000	2.584.065.000	-	-	-	3.144.801.134		0%	0%	0%	94%		2.966.767.500	3.144.801.134
9	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan	-	-	-	1.518.232.000	1.029.862.000	-	-	-	881.576.676		0%	0%	0%	58%		1.274.047.000	881.576.676
10	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	3.851.894.950	2.050.460.550	-	-	-	3.721.861.418		0%	0%	0%	97%		2.951.177.750	3.721.861.418
11	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	2.011.952.890	2.093.103.035	-	-	-	1.922.826.300		0%	0%	0%	96%		2.052.527.963	1.922.826.300
12	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	-	-	-	1.475.928.000	2.243.232.000	-	-	-	1.351.054.762		0%	0%	0%	92%		1.859.580.000	1.351.054.762
13	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah	-	-	-	61.500.128.048	60.083.154.400	-	-	-	59.962.937.058		0%	0%	0%	98%		60.791.641.224	59.962.937.058

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat kinerja realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selama lima tahun kebelakang. Dinamika kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat gagal lelang / batal lelang karena penyedia barang/jasa tidak dapat memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan, sehingga prosentase belanja pada tahun 2015 kurang optimal;
2. Jeda penunjukkan pejabat yang berwenang dalam pengadaan Barang dan Jasa setelah Re-organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sehingga terjadi keterlambatan proses pengadaan Barang/Jasa serta adanya pembatalan beberapa sub kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, berdampak pada kinerja realisasi belanja yang kurang optimal;
3. Terdapat sisa belanja kegiatan yang cukup signifikan dari belanja barang dengan metode seleksi penyediaanya dilakukan secara terbuka (lelang), serta adanya pembatalan beberapa sub kegiatan yang melibatkan pihak eksternal. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya kinerja realisasi belanja pada tahun 2017;
4. Perubahan peraturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta adanya perubahan kelompok kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdampak pada keterlambatan *progress* belanja barang/jasa Tahun 2018.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa terdapat tiga institusi dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pembayaran PKB. Para pihak tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, kemudian Bapenda Provinsi Jawa Timur selaku perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah, terakhir adalah PT Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak pelaksana pemungutan asuransi / Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan / standar baku layanan dan kemudian ditetapkan melalui keputusan bersama para pihak atau keputusan Tim Pembina SAMSAT.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bapenda Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan digitalisasi proses penetapan pajak daerah pada suatu sistem terintegrasi dengan seluruh KB. SAMSAT di Provinsi Jawa Timur, sehingga proses penerimaan dan penyetoran PKB dapat dimonitor secara akuntabel dan real time. Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Bapenda Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Rencana standarisasi struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah oleh Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah – Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. Konsep modernisasi adminitrasi perpajakan yang digagas oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis dan model bisnis yang mengandalkan sistem informasi / teknologi informasi terintegrasi dengan Lembaga dan pihak terkait;
3. Manajemen Identitas Wajib Pajak saat ini belum sepenuhnya memanfaatkan data nomor induk kependudukan atau NPWP yang terintegrasi dengan lembaga terkait, sehingga diperlukan manajemen identitas wajib pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP-D) yang terintegrasi;
4. Fungsi pembinaan dan pengawasan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi, masih belum optimal;

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Rencana perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan kebijakan perubahan skema Bagi Hasil Pajak dan opsen Pajak Pusat/Pajak Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. iDitetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
3. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan;
5. Terbentuknya pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara para pihak penyelenggara pelayanan, akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bapenda Provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan dari faktor internal maupun eksternal .

Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*) dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan (*Strength*) hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Budaya kerja, disiplin, komitmen dan konsisten yang kuat seluruh aparatur untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik;
2. Tersedianya prasarana pelayanan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang berada di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur;
3. Memiliki platform sistem dan jaringan teknologi informasi/komunikasi yang telah terintegrasi pada seluruh KB. SAMSAT di Jawa Timur;
4. Pola pengembangan jenis pelayanan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada, baik itu diselenggarakan sendiri atau bekerjasama dengan mitra;
5. Terjalinnnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas secara baik antar institusi terkait pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Disamping kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan (*Weakness*) hasil identifikasi dari internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

1. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta aset sarana dan prasarana pendukungnya.
2. Beberapa kondisi gedung KB. Samsat, kondisinya sudah tidak memadai, karena keterbatasan lahan, dan usia bangunan yang perlu peremajaan sehingga kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan pelaksana/fungsional Bapenda Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya dibekali dengan kompetensi yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis;
4. Mekanisme dan prosedur pengiriman TBPKB dan pengesahan secara elektronik masih dalam tahap pengembangan dan perlu untuk disempurnakan secara berkala;
5. Operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan atau kepulauan.

Faktor eksternal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam lembaga. Beberapa peluang (*Opportunities*) hasil identifikasi Bapenda Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur diproyeksikan meningkat, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru;
2. Infrastruktur teknologi informasi semakin maju dan merata, sehingga pengembangan pelayanan kedepan akan lebih dialihkan pada model bekerjasama dengan mitra berbasis teknologi informasi;
3. Dukungan regulasi dan komitmen dari para pihak terkait pengembangan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik;
4. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) hasil identifikasi Bapenda Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Tingkat ketergantungan Pendapatan daerah sampai dengan saat ini terhadap penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat tinggi, tidak diimbangi dengan jumlah alokasi belanja langsung yang diberikan pada Bapenda Provinsi Jawa Timur. Apabila kebutuhan dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan tidak dapat dipenuhi maka dikhawatirkan pelayanan yang diperoleh masyarakat tidak optimal.



2. Pemotongan langsung terhadap Pajak Rokok sebagai bentuk inovasi pemerintah pusat untuk menutupi defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyebabkan penerimaan PAD dari sektor Pajak Rokok berkurang.
3. Belum terdapat mekanisme validasi atas pajak daerah yang bersifat self assessment khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Mekanisme registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi sehingga prosesnya lebih lama dan margin of error yang cukup tinggi..

### 3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2024 adalah “ ***Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong*** ”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial , pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya

Pada ***Misi Ketiga***, menjelaskan bahwa misi ini mempunyai 2 (dua) Tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, dengan Sasaran sebagai berikut :
  - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
  - Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah;
  - Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
  - Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi

2. Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat;
- Meningkatnya kepedulian sosial;
- Pelestarian nilai-nilai budaya local;

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran berdasarkan rumusan diatas, maka dilaksanakan 2 (dua) strategi umum sebagai berikut:

1. Implementasi sistem meretokratik, complaint handling system, membangun birokrasi anti korupsi dan penguatan SPIP;
2. Mendorong sound governance, pelayanan berbasis IT, implementasi *e-government* guna pemanfaatan data pembangunan secara optimal;

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan PAD secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapenda Provinsi Jawa Timur telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yaitu :

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
2. Program Pengelolaan Pajak Daerah;
3. Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan,
4. Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah;
5. Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan;
7. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur;
8. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Selatan;

9. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara;
10. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat;
11. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto;
12. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo;
13. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro;
14. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang;
15. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik;
16. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan;
17. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk;
18. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban;
19. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Kota;
20. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan;
21. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota;
22. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar;
23. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan;
24. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi;

25. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember;
26. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo;
27. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lumajang;
28. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo;
29. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso;
30. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri;
31. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun;
32. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo;
33. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung;
34. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan;
35. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi;
36. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Trenggalek;
37. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan;
38. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pamekasan;
39. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bangkalan;
40. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang;

41. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep;
42. Program Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah;
43. Program Pelayanan Kesekretariatan Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Analisis lebih lanjut untuk menunjukkan keterkaitan pemilihan program pembangunan Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah dengan melakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung terhadap pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Adapun identifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “<i>Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</i>”</p> <p>Misi Kelima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “<i>Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris</i>”</p>			
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Perumusan dokumen potensi PAD belum optimal	Tingkat akurasi data objek pajak yang digunakan sebagai basis perhitungan potensi belum optimal	Basis data base objek pajak dan data pendukung lainnya cukup lengkap
			Penetapan target PAD belum	Pertumbuhan ekonomi di

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			sepenuhnya memperhatikan fackor dayadorong daya beli masyarakat	proyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya
		Sistem pelaporan penerimaan PAD yang belum optimal	Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	Setiap pegawai memiliki kinerja perorangan untuk menyampaikan surat perpajakan
2.	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Penerimaan dari sektor Pajak Daerah belum optimal	Penetapan tarif pajak daerah dibawah batas maksimal yang diperkenankan oleh undang-undang	Penetapan Tata kelola, SOP dan dukungan regulasi
			Penyesuaian tarif NJKB belum Optimal	
3.	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	Penerimaan RJU yang cenderung stagnan	Pemanfaatan lahan di KB.SAMSAT/ UPT khususnya untuk ATM, TNKB, dan space promosi belum optimal	Jumlah Aset daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
			Metode penjualan kayu hasil hutan saat ini bisa dilakukan secara online, sehingga penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan cenderung turun	Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Perum Perhutani
		Penerimaan dari sektor Lain-lain Pendapatan belum optimal	fasilitas pelayanan parkir berlangganan yang diberikan pada masyarakat oleh Pemkab/Pemkot belum optimal	Fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan mendapat respon positif dari Pemkab/Pemkot
			Sering terjadi selisih penerimaan pada pembayaran link (lintas kab/kota)	Merekomendasikan pada Pemkab/Pemkot untuk memiliki rekening penampungan
4	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal	Mekanisme yang panjang serta biaya yang tinggi	Pelaksanaan audit dan surveillence secara berkala

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Basis kompetensi dan kualifikasi petugas pengendalian belum sepenuhnya setara dengan auditor	Penetapan Metode dan SOP pengendalian serta peningkatan kualitas melalui Diklat/Bintek
6	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	Tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efisien, aman dan terjamin kepastiannya	Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur	Dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru
			Kebutuhan pendanaan yang tinggi	
7	Program Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah di seluruh UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ( 35 UPT)	Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan PAD dan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat	Perbandingan luas wilayah dan medan operasional dengan sarpras penunjang masih belum memadai	Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait terbangun baik
.8	Program Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kualitas perencanaan belum optimal	Gap pagu indikatif pada tahap perencanaan dan penganggaran cukup tinggi	Didukung melalui sistem e-planning yang mengintegrasikan dokumen perencanaan sampai dengan dokumen penganggaran
9.	Program Pelayanan Kesekretariatan Bapenda Provinsi Jawa Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak, serta <i>overhead cost</i> semakin meningkat	Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders
		Perkembangan jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat semakin meningkat	Keterbatasan anggaran yang diterima	Sistem dan metode pencatatan aset tertib
		Penempatan aparatur belum terpetakan	Piramida pangkat/golongan	Pelatihan/ bintek kompetensi teknis

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		sesuai dengan kompetensi akomodasi sehingga kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	ruang dan background kompetensi kurang ideal	secara reguler
		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/siklus perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan

### 3.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2024.

Bapenda Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut serta mendukung program nasional Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor 128/ PMK.07/ 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dalam penghitungan target penerimaan Pajak Rokok.



Berdasarkan hasil telaah terhadap pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya dan kondisi pada saat ini Bapenda Provinsi Jawa Timur menemukan permasalahan, serta faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Timur**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat ketergantungan terhadap Pajak Daerah sangat tinggi	Sektor Pajak Daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas
		Tarif dibawah batasan maksimal	Penerimaan Pajak Daerah tidak optimal	Besaran penetapan pajak daerah lebih kecil
		Penerimaan Retribusi Jasa Usaha belum optimal	Jumlah objek retribusi yang dapat dipungut terbatas	Disetiap kantor UPT/ KB.SAMSAT memiliki potensi RPKD
		Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan belum optimal	Minat masyarakat terhadap produksi kayu Perum Perhutani menurun	Koordinasi yang terbangun telah berjalan baik, sehingga dapat memeberikan usulan kepada Perum Perhutani untuk memenuhi kayu sesuai permintaan
		Penerimaan Pendapatan Lain-lain belum optimal	Pemerintah Kab/Kota belum memiliki komitmen yang	Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir di

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			kuat terhadap Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan	Tepi Jalan Umum secara Berlangganan di dukung oleh <i>stakeholder</i> tingkat Kab/Kota maupun Provinsi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Menjaga kualitas pelayanan di KB. SAMSAT	Tingkat kesiapan Sarana dan Prasarana belum optimal	Penyelenggaraan terstandar ISO 9001-2015
		Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Pengembangan layanan unggulan bersifat kewilayahan	Memulai kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan mitra yang jangkauan wilayah operasinya luas
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas ASN belum maksimal	Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing	Dapat ditingkatkan melalui diklat/bintek
		Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran belum optimal	Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi	Memprioritaskan unsur pendukung pelayanan publik

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tata ruang Provinsi Jawa Timur merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang secara optimal, umumnya dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Timur ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional.

Pengembangan pola ruang dalam sistem Tata ruang tersebut tentu sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Kaitan aspek pengaruh lingkungan hidup terhadap Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah terjadinya kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor baik itu kendaraan penumpang, niaga maupun kendaraan bermotor alat berat pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor adalah terjadinya polusi udara, dimana tingkat pencemarannya semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Jawa Timur cukup tinggi, dengan rata-rata prosentase pertumbuhan 10% pertahunnya. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Jawa Timur, maka probabilitas semakin buruknya polusi udara akan semakin meningkat pula.

Bapenda Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, serta menetapkan regulasi tentang batasan emisi gas buang kendaraan bermotor, sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap tingkat kebersihan di udara. Namun alternatif tindakan *preventif* yang dapat dilakukan kerusakan tersebut melakukan fungsi *regulerend* diantaranya yaitu : (1) mengkaji dan

mengusulkan penetapan Pajak Kendaraan bagi kendaraan non emisi berbahan bakar listrik, (2) memberlakukan tarif berbeda bagi kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor, serta dengan memberlakukan Pajak *Progresif* pada kepemilikan kendaraan bermotor (Roda 4) lebih dari 1 (satu). Cara ini diharapkan dapat mengendalikan proyeksi pertumbuhan kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pelimpahan beberapa kewenangan urusan pemerintah daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan belanja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pelaksanaan urusan tersebut. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Pajak Daerah, sedangkan di satu sisi kewenangan pemungutan PAD pemerintah provinsi bersifat *closed list*, bahkan ada beberapa sumber pendapatan tidak lagi bisa dipungut karena kewenangannya diambil oleh Pemerintah Pusat, seperti penerimaan dari Bandara tipe C, jembatan timbang dan lain sebagainya. Hal tersebut berpotensi besar untuk memperlebar *gap* antara kebutuhan pembangunan dengan penerimaan pendapatan. Sehingga diperlukan strategi jitu agar dapat menjaga keseimbangan antara belanja dengan pendapatan dan dapat menjaga kepastian penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bapenda Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan PAD. Fungsi Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Bapenda Provinsi Jawa Timur, disamping itu Bapenda Provinsi Jawa Timur juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Adapun isu-isu strategis hasil diidentifikasi oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan,
5. Peningkatan profesionalisme ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Penetapan rumusan Tujuan Bapenda Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan *Misi Ketiga* kepala daerah terpilih, yaitu: **“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan”** dengan rumusan Tujuan sebagai berikut: **“Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah”**. Dengan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Jawa Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah</b>	-	<b>Persentase PAD terhadap Total Pendapatan</b>		<b>46,71%</b>	<b>47,33%</b>	<b>47,87%</b>	<b>48,45%</b>	<b>49,14%</b>
	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah	1,86%	1,61%	2,84%	2,60%	2,67%	2,11%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Nilai Rata-rata SKM	86,00	87,79	87,84	87,89	87,94	87,99
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86,00%	88,00%	88,05%	88,10%	88,15%	88,20%
		Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	52,00	51,42%	51,47%	51,52%	51,57%	51,62%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,05	80,10	80,15	80,20	80,25

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**VISI : *Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong***

**MISI 3 : *Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan***

Tabel 5.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah</b>	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan 2. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor 3. Menentukan asumsi dalam perhitungan target pad 4. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah 5. Meningkatkan validasi atas	1. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status objek pajak 2. Evaluasi terhadap kebijakan yang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor 3. Menggunakan akurasi data objek dan perkembangan situasi ekonomi masyarakat sebagai basis perhitungan potensi 4. Mendorong stakeholder



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pajak daerah yang bersifat self assesment</p> <p>6. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha</p> <p>7. Mengoptimalkan penerimaan retribusi tempat pelelangan</p> <p>8. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan lain-lain</p>	<p>dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah</p> <p>5. Mengoptimalkan pengawasan atas pelaporan pajak yang bersifat self assesment</p> <p>6. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk atm, tnkb, dan space promosi pada upt/ kb. Samsat</p> <p>7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani dalam meningkatkan kualitas kayu yang akan di lelang</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota terkait fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan</p>
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<p>1. Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan</p> <p>2. Mengembangkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor</p>	<p>1. Pelaksanaan audit dan sertifikasi/standarisasi layanan melalui ISO</p> <p>2. Evaluasi nilai Standar Kepuasan Masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknologi informasi dengan pihak eksternal</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan kompetensi aparatur pendukung pelayanan	4. Mengikutsertakan aparatur pendukung pelayanan dalam pendidikan pelatihan/ bimbingan teknis terkait pelayanan publik
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan 2. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan 3. Meningkatkan kualitas asn dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	1. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah 2. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung 3. Memetakan asn sesuai dengan potensi masing-masing 4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi asn 5. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, melalui penjabaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019-2024. Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagaimana tabel beriku

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENACNGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah				Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	-	46,71%		47,33%		47,87%		48,45%		49,14%		49,14%	Badan Pendapatan Daerah		
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah		1,62%		2,68%		2,38%		2,55%		2,76%		2,76%	Bidang Perencanaan & Pengembangan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi & PLL, UPT Bapenda		
		3.0.07.51	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	15.103 milyar rupiah	15.003 Milyar Rupiah	1.303.928.500	15.428 Milyar Rupiah	1.343.046.355	15.829 Milyar Rupiah	1.383.337.746	16.255 Milyar Rupiah	1.424.837.878	16.605 Milyar Rupiah	1.467.583.014	79.120 Milyar Rupiah	Bidang Perencanaan & Pengembangan	Jawa Timur	
		3.0.07.51.001	Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD	2 dokumen	2 dokumen	1.191.452.500	2 dokumen	1.227.196.075	2 dokumen	1.264.011.957	2 dokumen	1.301.932.316	2 dokumen	1.340.990.285	10 dokumen			
		3.0.07.51.002	Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD	2 dokumen	2 dokumen	52.221.000	2 dokumen	53.787.630	2 dokumen	55.401.259	2 dokumen	57.063.297	2 dokumen	58.775.196	10 dokumen			
		3.0.07.51.003	Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi	12 dokumen	12 dokumen	60.255.000	12 dokumen	62.062.650	12 dokumen	63.924.530	12 dokumen	65.842.265	12 dokumen	67.817.533	60 dokumen			
		3.0.07.52	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	15.060 milyar rupiah	14.980 Milyar Rupiah	2.661.586.950	15.405 Milyar Rupiah	2.741.434.559	15.805 Milyar Rupiah	2.823.677.595	16.231 Milyar Rupiah	2.908.387.923	16.581 Milyar Rupiah	2.995.639.561	79.002 Milyar Rupiah	Bidang Pajak Daerah	Jawa Timur	
		3.0.07.52.001	Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB	8 dokumen	10 dokumen	2.347.076.450	10 dokumen	2.417.488.744	10 dokumen	2.490.013.406	10 dokumen	2.564.713.808	10 dokumen	2.641.655.222	50 dokumen			
		3.0.07.52.002	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	7 dokumen	16 dokumen	314.510.500	16 dokumen	323.945.815	16 dokumen	333.664.189	16 dokumen	343.674.115	16 dokumen	353.984.339	80 dokumen			
		3.0.07.53	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah & Lain-Lain Pendapatan	27,7 milyar rupiah	23,3 Milyar Rupiah	1.060.757.860	23,6 Milyar Rupiah	1.092.580.597	23,8 Milyar Rupiah	1.125.358.014	24,2 Milyar Rupiah	1.159.118.754	24,2 Milyar Rupiah	1.193.892.317	119 Milyar Rupiah	Bidang Retribusi & PLL	Jawa Timur	
		3.0.07.53.001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggalan Potensi Objek Retribusi Daerah	2 dokumen	2 dokumen	463.802.820	2 dokumen	477.716.905	2 dokumen	492.048.412	2 dokumen	506.809.864	2 dokumen	522.014.160	10 dokumen			
				Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan	2 dokumen	2 dokumen	463.802.820	2 dokumen	477.716.905	2 dokumen	492.048.412	2 dokumen	506.809.864	2 dokumen	522.014.160	10 dokumen			
		3.0.07.53.002	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	2 dokumen	2 dokumen	61.966.860	2 dokumen	63.825.866	2 dokumen	65.740.642	2 dokumen	67.712.861	2 dokumen	69.744.247	10 dokumen			
		3.0.07.53.003	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21	1 dokumen	2 dokumen	81.619.260	2 dokumen	84.067.838	2 dokumen	86.589.873	2 dokumen	89.187.569	2 dokumen	91.863.196	10 dokumen			
		3.0.07.53.004	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	4 dokumen	4 dokumen	453.368.920	4 dokumen	466.969.988	4 dokumen	480.979.087	4 dokumen	495.408.460	4 dokumen	510.270.714	20 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.15	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Timur	2.967 milyar rupiah	3.047 Milyar Rupiah	2.377.672.588	3.121 Milyar Rupiah	2.449.002.765	3.194 Milyar Rupiah	2.522.472.848	3.268 Milyar Rupiah	2.598.147.033	3.290 Milyar Rupiah	2.676.091.444	15.920 Milyar Rupiah	UPT PPD Surabaya Timur	Kota Surabaya	
		3.0.07.15.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	2 sertifikat	2.218.053.488	1 sertifikat	2.284.595.092	1 sertifikat	2.353.132.945	1 sertifikat	2.423.726.933	1 sertifikat	2.496.438.741	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	2 layanan	2.218.053.488	2 layanan	2.284.595.092	2 layanan	2.353.132.945	2 layanan	2.423.726.933	2 layanan	2.496.438.741	9 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	9 dokumen	2.218.053.488	9 dokumen	2.284.595.092	9 dokumen	2.353.132.945	9 dokumen	2.423.726.933	9 dokumen	2.496.438.741	45 dokumen			
		3.0.07.15.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Timur	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	94.111.100	1 dokumen	96.934.433	1 dokumen	99.842.466	1 dokumen	102.837.740	1 dokumen	105.922.872	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	94.111.100	2 dokumen	96.934.433	2 dokumen	99.842.466	2 dokumen	102.837.740	2 dokumen	105.922.872	10 dokumen			
		3.0.07.15.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Timur	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	65.508.000	2 dokumen	67.473.240	2 dokumen	69.497.437	2 dokumen	71.582.360	2 dokumen	73.729.831	10 dokumen			
		3.0.07.16	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Selatan	2.939 milyar rupiah	3.008 Milyar Rupiah	2.050.673.968	3.076 Milyar Rupiah	2.112.194.187	3.143 Milyar Rupiah	2.175.560.013	3.215 Milyar Rupiah	2.240.826.813	3.280	2.308.051.617	15.722 Milyar Rupiah	UPT PPD Surabaya Selatan	Kota Surabaya	
		3.0.07.16.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.860.329.968	1 sertifikat	1.916.139.867	2 sertifikat	1.973.624.063	sertifikat	2.032.832.785	1 sertifikat	2.093.817.768	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	2 layanan	1.860.329.968	2 layanan	1.916.139.867	2 layanan	1.973.624.063	2 layanan	2.032.832.785	2 layanan	2.093.817.768	7 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	7 dokumen	1.860.329.968	7 dokumen	1.916.139.867	7 dokumen	1.973.624.063	7 dokumen	2.032.832.785	7 dokumen	2.093.817.768	35 dokumen			
		3.0.07.16.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Selatan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	86.520.000	1 dokumen	89.115.600	1 dokumen	91.789.068	1 dokumen	94.542.740	1 dokumen	97.379.022	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	86.520.000	2 dokumen	89.115.600	2 dokumen	91.789.068	2 dokumen	94.542.740	2 dokumen	97.379.022	10 dokumen			
		3.0.07.16.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	103.824.000	2 dokumen	106.938.720	2 dokumen	110.146.882	2 dokumen	113.451.288	2 dokumen	116.854.827	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.17	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Utara	Jumlah Penerimaan di UPT PPD Surabaya Utara	683 milyar rupiah	663 Milyar Rupiah	2.467.141.300	683 Milyar Rupiah	2.541.155.539	701 Milyar Rupiah	2.617.390.205	720 Milyar Rupiah	2.695.911.911	739 Milyar Rupiah	2.776.789.270	3.506 Milyar Rupiah	UPT PPD Surabaya Utara	Kota Surabaya	
		3.0.07.17.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	2.285.274.200	1 sertifikat	2.353.832.426	1 sertifikat	2.424.447.399	1 sertifikat	2.497.180.821	1 sertifikat	2.572.096.246	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	7 layanan	2.285.274.200	7 layanan	2.353.832.426	7 layanan	2.424.447.399	7 layanan	2.497.180.821	7 layanan	2.572.096.246	7 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2.285.274.200	2 dokumen	2.353.832.426	2 dokumen	2.424.447.399	2 dokumen	2.497.180.821	2 dokumen	2.572.096.246	10 dokumen			
		3.0.07.17.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Utara	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	66.919.100	1 dokumen	68.926.673	1 dokumen	70.994.473	1 dokumen	73.124.307	1 dokumen	75.318.037	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	66.919.100	2 dokumen	68.926.673	2 dokumen	70.994.473	2 dokumen	73.124.307	2 dokumen	75.318.037	10 dokumen			
		3.0.07.17.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Utara	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	114.948.000	2 dokumen	118.396.440	2 dokumen	121.948.333	2 dokumen	125.606.783	2 dokumen	129.374.987	10 dokumen			
		3.0.07.18	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Surabaya Barat	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Barat	678 milyar rupiah	664 Milyar Rupiah	1.935.628.810	684 Milyar Rupiah	1.993.697.674	703 Milyar Rupiah	2.053.508.605	722 Milyar Rupiah	2.115.113.863	742 Milyar Rupiah	2.178.567.279	3.515 Milyar Rupiah	UPT PPD Surabaya Barat	Kota Surabaya	
		3.0.07.18.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.745.109.710	1 sertifikat	1.797.463.001	1 sertifikat	1.851.386.892	1 sertifikat	1.906.928.498	1 sertifikat	1.964.136.353	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	6 layanan	1.745.109.710	6 layanan	1.797.463.001	6 layanan	1.851.386.892	6 layanan	1.906.928.498	6 layanan	1.964.136.353	6 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.745.109.710	2 dokumen	1.797.463.001	2 dokumen	1.851.386.892	2 dokumen	1.906.928.498	2 dokumen	1.964.136.353	10 dokumen			
		3.0.07.18.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Surabaya Barat	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	52.087.100	1 dokumen	53.649.713	1 dokumen	55.259.204	1 dokumen	56.916.981	1 dokumen	58.624.490	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	52.087.100	2 dokumen	53.649.713	2 dokumen	55.259.204	2 dokumen	56.916.981	2 dokumen	58.624.490	10 dokumen			
		3.0.07.18.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Surabaya Barat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	138.432.000	2 dokumen	142.584.960	2 dokumen	146.862.509	2 dokumen	151.268.384	2 dokumen	155.806.436	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.19	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Mojokerto	362 milyar rupiah	348 Milyar Rupiah	2.184.457.161	358 Milyar Rupiah	2.249.990.876	368 Milyar Rupiah	2.317.490.602	378 Milyar Rupiah	2.387.015.320	388 Milyar Rupiah	2.458.625.779	1.840 Milyar Rupiah	UPT PPD Mojokerto	Kab/Kota Mojokerto	
		3.0.07.19.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	2 sertifikat	2.019.966.161	2 sertifikat	2.080.565.146	2 sertifikat	2.142.982.100	2 sertifikat	2.207.271.563	2 sertifikat	2.273.489.710	2 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	10 layanan	2.019.966.161	10 layanan	2.080.565.146	10 layanan	2.142.982.100	10 layanan	2.207.271.563	10 layanan	2.273.489.710	10 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2.019.966.161	2 dokumen	2.080.565.146	2 dokumen	2.142.982.100	2 dokumen	2.207.271.563	2 dokumen	2.273.489.710	10 dokumen			
		3.0.07.19.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	55.723.000	2 dokumen	57.394.690	2 dokumen	59.116.531	2 dokumen	60.890.027	2 dokumen	62.716.727	8 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	55.723.000	2 dokumen	57.394.690	2 dokumen	59.116.531	2 dokumen	60.890.027	2 dokumen	62.716.727	8 dokumen			
		3.0.07.19.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	108.768.000	2 dokumen	112.031.040	2 dokumen	115.391.971	2 dokumen	118.853.730	2 dokumen	122.419.342	10 dokumen			
		3.0.07.20	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sidoarjo	1.004 milyar rupiah	983 Milyar Rupiah	3.175.502.257	1.011 Milyar Rupiah	3.270.767.325	1.039 Milyar Rupiah	3.368.890.345	1.067 Milyar Rupiah	3.469.957.055	1.097 Milyar Rupiah	3.574.055.767	5.197 Milyar Rupiah	UPT PPD Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	
		3.0.07.20.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sidoarjo	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	2.986.600.257	2 sertifikat	3.076.198.265	2 sertifikat	3.168.484.213	2 sertifikat	3.263.538.739	2 sertifikat	3.361.444.901	2 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan	10 layanan	2.986.600.257	10 layanan	3.076.198.265	10 layanan	3.168.484.213	10 layanan	3.263.538.739	10 layanan	3.361.444.901	10 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2.986.600.257	2 dokumen	3.076.198.265	2 dokumen	3.168.484.213	2 dokumen	3.263.538.739	2 dokumen	3.361.444.901	10 dokumen			
		3.0.07.20.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	96.202.000	2 dokumen	99.088.060	2 dokumen	102.060.702	2 dokumen	105.122.523	2 dokumen	108.276.199	10 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	96.202.000	2 dokumen	99.088.060	2 dokumen	102.060.702	2 dokumen	105.122.523	2 dokumen	108.276.199	10 dokumen			
		3.0.07.20.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	92.700.000	2 dokumen	95.481.000	2 dokumen	98.345.430	2 dokumen	101.295.793	2 dokumen	104.334.667	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
						2020		2021		2022		2023		2024										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		3.0.07.21	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bojonegoro	205 milyar rupiah	199	193	1.615.535.327	200	Milyar Rupiah	1.664.001.387	205	Milyar Rupiah	1.713.921.428	211	Milyar Rupiah	1.765.339.071	217	Milyar Rupiah	1.818.299.244	1.026	Milyar Rupiah	UPT PPD Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro
		3.0.07.21.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1	1	1.482.356.327	1	sertifikat	1.526.827.017	1	sertifikat	1.572.631.827	1	sertifikat	1.619.810.782	1	sertifikat	1.668.405.106	1	sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan	8	8	1.482.356.327	8	layanan	1.526.827.017	8	layanan	1.572.631.827	8	layanan	1.619.810.782	8	layanan	1.668.405.106	8	layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2	2	1.482.356.327	2	dokumen	1.526.827.017	2	dokumen	1.572.631.827	2	dokumen	1.619.810.782	2	dokumen	1.668.405.106	10	dokumen		
		3.0.07.21.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1	1	52.221.000	1	dokumen	53.787.630	1	dokumen	55.401.259	1	dokumen	57.063.297	1	dokumen	58.775.196	5	dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2	2	52.221.000	2	dokumen	53.787.630	2	dokumen	55.401.259	2	dokumen	57.063.297	2	dokumen	58.775.196	10	dokumen		
		3.0.07.21.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2	2	80.958.000	2	dokumen	83.386.740	2	dokumen	85.688.342	2	dokumen	88.464.992	2	dokumen	91.118.942	10	dokumen		
		3.0.07.22	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jombang	256 milyar rupiah	245	245	1.799.169.500	253	Milyar Rupiah	1.853.144.585	260	Milyar Rupiah	1.908.738.923	267	Milyar Rupiah	1.966.001.091	274	Milyar Rupiah	2.024.981.124	1.299	Milyar Rupiah	UPT PPD Jombang	Kabupaten Jombang
		3.0.07.22.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jombang	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1	1	1.633.082.000	1	sertifikat	1.682.074.460	1	sertifikat	1.732.536.694	1	sertifikat	1.784.512.795	1	sertifikat	1.838.048.179	1	sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	9	9	1.633.082.000	9	layanan	1.682.074.460	9	layanan	1.732.536.694	9	layanan	1.784.512.795	9	layanan	1.838.048.179	9	layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2	2	1.633.082.000	2	dokumen	1.682.074.460	2	dokumen	1.732.536.694	2	dokumen	1.784.512.795	2	dokumen	1.838.048.179	10	dokumen		
		3.0.07.22.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Jombang	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1	1	82.966.500	1	dokumen	85.455.495	1	dokumen	88.019.160	1	dokumen	90.659.735	1	dokumen	93.379.527	5	dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2	2	82.966.500	2	dokumen	85.455.495	2	dokumen	88.019.160	2	dokumen	90.659.735	2	dokumen	93.379.527	10	dokumen		
		3.0.07.22.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jombang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2	2	83.121.000	2	dokumen	85.614.630	2	dokumen	88.183.069	2	dokumen	90.828.561	2	dokumen	93.553.418	10	dokumen		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.23	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Gresik	426 milyar rupiah	408 Milyar Rupiah	1.922.382.524	421 Milyar Rupiah	1.980.054.000	433 Milyar Rupiah	2.039.455.619	444 Milyar Rupiah	2.100.639.288	456 Milyar Rupiah	2.163.658.467	2.162 Milyar Rupiah	UPT PPD Gresik	Kabupaten Gresik
		3.0.07.23.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Gresik	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.808.155.524	1 sertifikat	1.862.400.190	1 sertifikat	1.918.272.195	1 sertifikat	1.975.820.361	1 sertifikat	2.035.094.972	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	9 layanan	10 layanan	1.808.155.524	10 layanan	1.862.400.190	10 layanan	1.918.272.195	10 layanan	1.975.820.361	10 layanan	2.035.094.972	10 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.808.155.524	2 dokumen	1.862.400.190	2 dokumen	1.918.272.195	2 dokumen	1.975.820.361	2 dokumen	2.035.094.972	10 dokumen		
		3.0.07.23.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Gresik	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	46.247.000	1 dokumen	47.634.410	1 dokumen	49.063.442	1 dokumen	50.535.346	1 dokumen	52.051.406	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	46.247.000	2 dokumen	47.634.410	2 dokumen	49.063.442	2 dokumen	50.535.346	2 dokumen	52.051.406	10 dokumen		
		3.0.07.23.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Gresik	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	67.980.000	2 dokumen	70.019.400	2 dokumen	72.119.982	2 dokumen	74.283.581	2 dokumen	76.512.089	10 dokumen		
		3.0.07.24	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan	229 milyar rupiah	218 Milyar Rupiah	1.359.406.772	225 Milyar Rupiah	1.400.188.975	231 Milyar Rupiah	1.442.194.645	238 Milyar Rupiah	1.485.460.484	244 Milyar Rupiah	1.530.024.299	1.156 Milyar Rupiah	UPT PPD Lamongan	Kabupaten Lamongan
		3.0.07.24.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.230.553.772	1 sertifikat	1.267.470.385	1 sertifikat	1.305.494.497	1 sertifikat	1.344.659.332	1 sertifikat	1.384.999.112	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	8 layanan	1.230.553.772	8 layanan	1.267.470.385	8 layanan	1.305.494.497	8 layanan	1.344.659.332	8 layanan	1.384.999.112	8 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.230.553.772	2 dokumen	1.267.470.385	2 dokumen	1.305.494.497	2 dokumen	1.344.659.332	2 dokumen	1.384.999.112	10 dokumen		
		3.0.07.24.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	51.603.000	1 dokumen	53.151.090	1 dokumen	54.745.623	1 dokumen	56.387.991	1 dokumen	58.079.631	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	51.603.000	2 dokumen	53.151.090	2 dokumen	54.745.623	2 dokumen	56.387.991	2 dokumen	58.079.631	10 dokumen		
		3.0.07.24.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	77.250.000	2 dokumen	79.567.500	2 dokumen	81.954.525	2 dokumen	84.413.161	2 dokumen	86.945.556	10 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.25	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Nganjuk	198 milyar rupiah	191 Milyar Rupiah	1.504.619.355	199 Milyar Rupiah	1.549.757.935	204 Milyar Rupiah	1.596.250.673	211 Milyar Rupiah	1.644.138.193	216 Milyar Rupiah	1.693.462.340	1.021 Milyar Rupiah	UPT PPD Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
		3.0.07.25.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.370.719.355	1 sertifikat	1.411.840.935	1 sertifikat	1.454.196.163	1 sertifikat	1.497.822.048	1 sertifikat	1.542.756.710	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	6 layanan	1.370.719.355	6 layanan	1.411.840.935	6 layanan	1.454.196.163	6 layanan	1.497.822.048	6 layanan	1.542.756.710	6 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.370.719.355	2 dokumen	1.411.840.935	2 dokumen	1.454.196.163	2 dokumen	1.497.822.048	2 dokumen	1.542.756.710	10 dokumen		
		3.0.07.25.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	64.684.000	1 dokumen	66.624.520	1 dokumen	68.623.256	1 dokumen	70.681.953	1 dokumen	72.802.412	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	64.684.000	2 dokumen	66.624.520	2 dokumen	68.623.256	2 dokumen	70.681.953	2 dokumen	72.802.412	10 dokumen		
		3.0.07.25.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	69.216.000	2 dokumen	71.292.480	2 dokumen	73.431.254	2 dokumen	75.634.192	2 dokumen	77.903.218	10 dokumen		
		3.0.07.26	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tuban	218 milyar rupiah	216 Milyar Rupiah	1.516.030.838	223 Milyar Rupiah	1.561.511.763	230 Milyar Rupiah	1.608.357.117	236 Milyar Rupiah	1.656.607.830	242 Milyar Rupiah	1.706.306.065	1.147 Milyar Rupiah	UPT PPD Tuban	Kabupaten Tuban
		3.0.07.26.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tuban	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.344.535.838	1 sertifikat	1.384.871.913	1 sertifikat	1.426.418.071	1 sertifikat	1.469.210.613	1 sertifikat	1.513.286.931	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	6 layanan	1.344.535.838	6 layanan	1.384.871.913	6 layanan	1.426.418.071	6 layanan	1.469.210.613	6 layanan	1.513.286.931	6 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.344.535.838	2 dokumen	1.384.871.913	2 dokumen	1.426.418.071	2 dokumen	1.469.210.613	2 dokumen	1.513.286.931	10 dokumen		
		3.0.07.26.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Tuban	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	63.345.000	1 dokumen	65.245.350	1 dokumen	67.202.711	1 dokumen	69.218.792	1 dokumen	71.295.356	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	63.345.000	2 dokumen	65.245.350	2 dokumen	67.202.711	2 dokumen	69.218.792	2 dokumen	71.295.356	10 dokumen		
		3.0.07.26.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Tuban	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	108.150.000	2 dokumen	111.394.500	2 dokumen	114.736.335	2 dokumen	118.178.425	2 dokumen	121.723.778	10 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.27	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Kota	486 milyar rupiah	476 Milyar Rupiah	1.673.702.134	491 Milyar Rupiah	1.723.913.198	504 Milyar Rupiah	1.775.630.594	520 Milyar Rupiah	1.828.899.512	534 Milyar Rupiah	1.883.766.496	2.525 Milyar Rupiah	UPT PPD Malang Kota	Kota Malang
		3.0.07.27.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.563.080.134	1 sertifikat	1.609.972.538	1 sertifikat	1.658.271.714	1 sertifikat	1.708.019.865	1 sertifikat	1.759.260.461	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	5 layanan	1.563.080.134	5 layanan	1.609.972.538	5 layanan	1.658.271.714	5 layanan	1.708.019.865	5 layanan	1.759.260.461	5 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.563.080.134	2 dokumen	1.609.972.538	2 dokumen	1.658.271.714	2 dokumen	1.708.019.865	2 dokumen	1.759.260.461	10 dokumen		
		3.0.07.27.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Kota	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	48.822.000	1 dokumen	50.286.660	1 dokumen	51.795.260	1 dokumen	53.349.118	1 dokumen	54.949.591	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	48.822.000	2 dokumen	50.286.660	2 dokumen	51.795.260	2 dokumen	53.349.118	2 dokumen	54.949.591	10 dokumen		
		3.0.07.27.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	61.800.000	2 dokumen	63.654.000	2 dokumen	65.563.620	2 dokumen	67.530.529	2 dokumen	69.556.444	10 dokumen		
		3.0.07.28	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Selatan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Selatan	288 milyar rupiah	281 Milyar Rupiah	1.608.838.988	290 Milyar Rupiah	1.657.097.978	298 Milyar Rupiah	1.706.810.917	307 Milyar Rupiah	1.758.015.245	315 Milyar Rupiah	1.810.755.702	1.491 Milyar Rupiah	UPT PPD Malang Selatan	Kabupaten Malang Selatan
		3.0.07.28.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.458.834.088	1 sertifikat	1.502.599.111	1 sertifikat	1.547.677.084	1 sertifikat	1.594.107.397	1 sertifikat	1.641.930.619	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	7 layanan	1.458.834.088	7 layanan	1.502.599.111	7 layanan	1.547.677.084	7 layanan	1.594.107.397	7 layanan	1.641.930.619	7 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.458.834.088	2 dokumen	1.502.599.111	2 dokumen	1.547.677.084	2 dokumen	1.594.107.397	2 dokumen	1.641.930.619	10 dokumen		
		3.0.07.28.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	75.838.900	1 dokumen	78.114.067	1 dokumen	80.457.489	1 dokumen	82.871.214	1 dokumen	85.357.350	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	75.838.900	2 dokumen	78.114.067	2 dokumen	80.457.489	2 dokumen	82.871.214	2 dokumen	85.357.350	10 dokumen		
		3.0.07.28.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	74.160.000	2 dokumen	76.384.800	2 dokumen	78.676.344	2 dokumen	81.036.634	2 dokumen	83.467.733	10 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.29	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	311 milyar rupiah	301 Milyar Rupiah	1.908.288.725	311 Milyar Rupiah	1.965.537.387	320 Milyar Rupiah	2.024.503.508	329 Milyar Rupiah	2.085.238.614	337 Milyar Rupiah	2.147.795.772	1.598 Milyar Rupiah	UPT PPD Malang Utara & Batu Kota	Kota Malang & Kota Batu	
		3.0.07.29.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	1.743.900.725	2 sertifikat	1.796.217.747	2 sertifikat	1.850.104.279	2 sertifikat	1.905.607.408	2 sertifikat	1.962.775.630	2 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	5 layanan	1.743.900.725	5 layanan	1.796.217.747	5 layanan	1.850.104.279	5 layanan	1.905.607.408	5 layanan	1.962.775.630	5 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.743.900.725	2 dokumen	1.796.217.747	2 dokumen	1.850.104.279	2 dokumen	1.905.607.408	2 dokumen	1.962.775.630	10 dokumen			
		3.0.07.29.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	129.162.000	2 dokumen	133.036.860	2 dokumen	137.027.966	2 dokumen	141.138.805	2 dokumen	145.372.969	10 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	129.162.000	2 dokumen	133.036.860	2 dokumen	137.027.966	2 dokumen	141.138.805	2 dokumen	145.372.969	10 dokumen			
		3.0.07.29.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	35.226.000	2 dokumen	36.282.780	2 dokumen	37.371.263	2 dokumen	38.492.401	2 dokumen	39.647.173	10 dokumen			
		3.0.07.30	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Blitar	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Blitar	316 milyar rupiah	318 Milyar Rupiah	1.868.522.382	329 Milyar Rupiah	1.924.578.053	338 Milyar Rupiah	1.982.315.395	348 Milyar Rupiah	2.041.784.857	359 Milyar Rupiah	2.103.038.403	1.692 Milyar Rupiah	UPT PPD Blitar	Kab/Kota Blitar	
		3.0.07.30.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Blitar	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	1.696.100.382	2 sertifikat	1.746.983.393	2 sertifikat	1.799.392.895	2 sertifikat	1.853.374.682	2 sertifikat	1.908.975.923	2 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	11 layanan	1.696.100.382	11 layanan	1.746.983.393	11 layanan	1.799.392.895	11 layanan	1.853.374.682	11 layanan	1.908.975.923	11 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.696.100.382	2 dokumen	1.746.983.393	2 dokumen	1.799.392.895	2 dokumen	1.853.374.682	2 dokumen	1.908.975.923	10 dokumen			
		3.0.07.30.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Blitar	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	101.970.000	2 dokumen	105.029.100	2 dokumen	108.179.973	2 dokumen	111.425.372	2 dokumen	114.768.133	10 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	101.970.000	2 dokumen	105.029.100	2 dokumen	108.179.973	2 dokumen	111.425.372	2 dokumen	114.768.133	10 dokumen			
		3.0.07.30.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Blitar	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	70.452.000	2 dokumen	72.565.560	2 dokumen	74.742.527	2 dokumen	76.984.803	2 dokumen	79.294.347	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.31	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pasuruan	350 milyar rupiah	343 Milyar Rupiah	2.235.951.939	354 Milyar Rupiah	2.303.030.497	364 Milyar Rupiah	2.372.121.412	376 Milyar Rupiah	2.443.285.054	386 Milyar Rupiah	2.516.583.606	1.823 Milyar Rupiah	UPT PPD Pasuruan	Kab/Kota Pasuruan
		3.0.07.31.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	2.033.635.219	2 sertifikat	2.094.644.275	2 sertifikat	2.157.483.604	2 sertifikat	2.222.208.112	2 sertifikat	2.288.874.355	2 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	10 layanan	2.033.635.219	10 layanan	2.094.644.275	10 layanan	2.157.483.604	10 layanan	2.222.208.112	10 layanan	2.288.874.355	10 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2.033.635.219	2 dokumen	2.094.644.275	2 dokumen	2.157.483.604	2 dokumen	2.222.208.112	2 dokumen	2.288.874.355	10 dokumen		
		3.0.07.31.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	134.336.720	2 dokumen	138.366.822	2 dokumen	142.517.826	2 dokumen	146.793.361	2 dokumen	151.197.162	10 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	134.336.720	2 dokumen	138.366.822	2 dokumen	142.517.826	2 dokumen	146.793.361	2 dokumen	151.197.162	10 dokumen		
		3.0.07.31.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	67.980.000	2 dokumen	70.019.400	2 dokumen	72.119.982	2 dokumen	74.283.581	2 dokumen	76.512.089	10 dokumen		
		3.0.07.32	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Banyuwangi	353 milyar rupiah	344 Milyar Rupiah	1.953.532.814	354 Milyar Rupiah	2.012.138.798	364 Milyar Rupiah	2.072.502.962	374 Milyar Rupiah	2.134.678.052	385 Milyar Rupiah	2.198.718.393	1.821 Milyar Rupiah	UPT PPD Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
		3.0.07.32.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	1.749.438.314	2 sertifikat	1.801.921.463	2 sertifikat	1.855.979.107	2 sertifikat	1.911.658.481	2 sertifikat	1.969.008.235	2 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	9 layanan	11 layanan	1.749.438.314	11 layanan	1.801.921.463	11 layanan	1.855.979.107	11 layanan	1.911.658.481	11 layanan	1.969.008.235	11 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.749.438.314	2 dokumen	1.801.921.463	2 dokumen	1.855.979.107	2 dokumen	1.911.658.481	2 dokumen	1.969.008.235	10 dokumen		
		3.0.07.32.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Banyuwangi	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	115.102.500	2 dokumen	118.555.575	2 dokumen	122.112.242	2 dokumen	125.775.610	2 dokumen	129.548.878	10 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	115.102.500	2 dokumen	118.555.575	2 dokumen	122.112.242	2 dokumen	125.775.610	2 dokumen	129.548.878	10 dokumen		
		3.0.07.32.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Banyuwangi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	88.992.000	2 dokumen	91.661.760	2 dokumen	94.411.613	2 dokumen	97.243.961	2 dokumen	100.161.280	10 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.33	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jember	339 milyar rupiah	336 Milyar Rupiah	2.345.812.125	345 Milyar Rupiah	2.416.186.489	354 Milyar Rupiah	2.488.672.084	364 Milyar Rupiah	2.563.332.246	374 Milyar Rupiah	2.640.232.213	1.773 Milyar Rupiah	UPT PPD Jember	Kabupaten Jember	
		3.0.07.33.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Jember	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	2.068.330.125	2 sertifikat	2.130.380.029	2 sertifikat	2.194.291.430	2 sertifikat	2.260.120.173	2 sertifikat	2.327.923.778	2 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	10 layanan	2.068.330.125	10 layanan	2.130.380.029	10 layanan	2.194.291.430	10 layanan	2.260.120.173	10 layanan	2.327.923.778	10 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2.068.330.125	2 dokumen	2.130.380.029	2 dokumen	2.194.291.430	2 dokumen	2.260.120.173	2 dokumen	2.327.923.778	10 dokumen			
		3.0.07.33.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Jember	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	156.354.000	2 dokumen	161.044.620	2 dokumen	165.875.959	2 dokumen	170.852.237	2 dokumen	175.977.804	10 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	156.354.000	2 dokumen	161.044.620	2 dokumen	165.875.959	2 dokumen	170.852.237	2 dokumen	175.977.804	10 dokumen			
		3.0.07.33.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Jember	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	121.128.000	2 dokumen	124.761.840	2 dokumen	128.504.695	2 dokumen	132.359.836	2 dokumen	136.330.631	10 dokumen			
		3.0.07.34	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Probolinggo	222 milyar rupiah	208 Milyar Rupiah	2.159.278.914	214 Milyar Rupiah	2.224.057.281	220 Milyar Rupiah	2.290.779.000	227 Milyar Rupiah	2.359.502.369	233 Milyar Rupiah	2.430.287.441	1.102 Milyar Rupiah	UPT PPD Probolinggo	Kab/Kota Probolinggo	
		3.0.07.34.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	1.993.654.914	2 sertifikat	2.053.464.561	2 sertifikat	2.115.068.498	2 sertifikat	2.178.520.553	2 sertifikat	2.243.876.170	2 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	8 layanan	1.993.654.914	8 layanan	2.053.464.561	8 layanan	2.115.068.498	8 layanan	2.178.520.553	8 layanan	2.243.876.170	8 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.993.654.914	2 dokumen	2.053.464.561	2 dokumen	2.115.068.498	2 dokumen	2.178.520.553	2 dokumen	2.243.876.170	10 dokumen			
		3.0.07.34.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	111.240.000	2 dokumen	114.577.200	2 dokumen	118.014.516	2 dokumen	121.554.951	2 dokumen	125.201.600	10 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	111.240.000	2 dokumen	114.577.200	2 dokumen	118.014.516	2 dokumen	121.554.951	2 dokumen	125.201.600	10 dokumen			
		3.0.07.34.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	54.384.000	2 dokumen	56.015.520	2 dokumen	57.695.986	2 dokumen	59.426.865	2 dokumen	61.209.671	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.35	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lumajang	144 milyar rupiah	139 Milyar Rupiah	1.320.079.106	145 Milyar Rupiah	1.359.681.479	148 Milyar Rupiah	1.400.471.923	152 Milyar Rupiah	1.442.486.082	156 Milyar Rupiah	1.485.760.664	738 Milyar Rupiah	UPT PPD Lumajang	Kabupaten Lumajang
		3.0.07.35.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.184.737.106	1 sertifikat	1.220.279.219	1 sertifikat	1.256.887.596	1 sertifikat	1.294.594.224	1 sertifikat	1.333.432.050	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	6 layanan	1.184.737.106	6 layanan	1.220.279.219	6 layanan	1.256.887.596	6 layanan	1.294.594.224	6 layanan	1.333.432.050	6 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.184.737.106	2 dokumen	1.220.279.219	2 dokumen	1.256.887.596	2 dokumen	1.294.594.224	2 dokumen	1.333.432.050	10 dokumen		
		3.0.07.35.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	53.766.000	1 dokumen	55.378.980	1 dokumen	57.040.349	1 dokumen	58.751.560	1 dokumen	60.514.107	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	53.766.000	2 dokumen	55.378.980	2 dokumen	57.040.349	2 dokumen	58.751.560	2 dokumen	60.514.107	10 dokumen		
		3.0.07.35.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	81.576.000	2 dokumen	84.023.280	2 dokumen	86.543.978	2 dokumen	89.140.298	2 dokumen	91.814.507	10 dokumen		
		3.0.07.36	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Situbondo	85 milyar rupiah	79 Milyar Rupiah	1.359.674.984	82 Milyar Rupiah	1.400.465.234	84 Milyar Rupiah	1.442.479.190	87 Milyar Rupiah	1.485.753.566	89 Milyar Rupiah	1.530.326.174	421 Milyar Rupiah	UPT PPD Situbondo	Kabupaten Situbondo
		3.0.07.36.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.223.302.984	1 sertifikat	1.260.002.074	1 sertifikat	1.297.802.136	1 sertifikat	1.336.736.200	1 sertifikat	1.376.838.286	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 layanan	4 layanan	1.223.302.984	8 layanan	1.260.002.074	4 layanan	1.297.802.136	layanan	1.336.736.200	4 layanan	1.376.838.286	4 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.223.302.984	2 dokumen	1.260.002.074	2 dokumen	1.297.802.136	2 dokumen	1.336.736.200	2 dokumen	1.376.838.286	10 dokumen		
		3.0.07.36.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	51.706.000	1 dokumen	53.257.180	1 dokumen	54.854.895	1 dokumen	56.500.542	1 dokumen	58.195.559	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	51.706.000	2 dokumen	53.257.180	2 dokumen	54.854.895	2 dokumen	56.500.542	2 dokumen	58.195.559	10 dokumen		
		3.0.07.36.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	84.666.000	2 dokumen	87.205.980	2 dokumen	89.822.159	2 dokumen	92.516.824	2 dokumen	95.292.329	10 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.37	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bondowoso	80 milyar rupiah	74 Milyar Rupiah	1.321.664.894	76 Milyar Rupiah	1.361.314.841	79 Milyar Rupiah	1.402.154.286	82 Milyar Rupiah	1.444.218.915	84 Milyar Rupiah	1.487.545.483	395 Milyar Rupiah	UPT PPD Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
		3.0.07.37.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.172.623.894	1 sertifikat	1.207.802.611	1 sertifikat	1.244.036.689	1 sertifikat	1.281.357.790	1 sertifikat	1.319.798.524	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	5 layanan	1.172.623.894	5 layanan	1.207.802.611	5 layanan	1.244.036.689	5 layanan	1.281.357.790	5 layanan	1.319.798.524	5 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.172.623.894	2 dokumen	1.207.802.611	2 dokumen	1.244.036.689	2 dokumen	1.281.357.790	2 dokumen	1.319.798.524	10 dokumen		
		3.0.07.37.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bondowoso	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	60.049.000	1 dokumen	61.850.470	1 dokumen	63.705.984	1 dokumen	65.617.164	1 dokumen	67.585.679	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	60.049.000	2 dokumen	61.850.470	2 dokumen	63.705.984	2 dokumen	65.617.164	2 dokumen	67.585.679	10 dokumen		
		3.0.07.37.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bondowoso	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	88.992.000	2 dokumen	91.661.760	2 dokumen	94.411.613	2 dokumen	97.243.961	2 dokumen	100.161.280	10 dokumen		
		3.0.07.38	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Kediri	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Kediri	466 milyar rupiah	467 Milyar Rupiah	2.487.316.821	482 Milyar Rupiah	2.561.996.326	496 Milyar Rupiah	2.638.794.415	511 Milyar Rupiah	2.717.958.247	525 Milyar Rupiah	2.799.496.996	2.481 Milyar Rupiah	UPT PPD Kediri	Kab/Kota Kediri
		3.0.07.38.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Kediri	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	3 sertifikat	3 sertifikat	2.237.644.821	3 sertifikat	2.304.774.166	3 sertifikat	2.373.917.391	3 sertifikat	2.445.134.912	3 sertifikat	2.518.488.960	3 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan	11 layanan	2.237.644.821	11 layanan	2.304.774.166	11 layanan	2.373.917.391	11 layanan	2.445.134.912	11 layanan	2.518.488.960	11 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2.237.644.821	2 dokumen	2.304.774.166	2 dokumen	2.373.917.391	2 dokumen	2.445.134.912	2 dokumen	2.518.488.960	10 dokumen		
		3.0.07.38.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Kediri	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	6 dokumen	3 dokumen	149.556.000	3 dokumen	154.042.680	3 dokumen	158.663.960	3 dokumen	163.423.879	3 dokumen	168.326.596	15 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	149.556.000	2 dokumen	154.042.680	2 dokumen	158.663.960	2 dokumen	163.423.879	2 dokumen	168.326.596	10 dokumen		
		3.0.07.38.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Kediri	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	100.116.000	2 dokumen	103.119.480	2 dokumen	106.213.064	2 dokumen	109.399.456	2 dokumen	112.681.440	10 dokumen		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.39	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Madiun	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Madiun	229 milyar rupiah	229 Milyar Rupiah	2.013.129.026	237 Milyar Rupiah	2.073.522.897	244 Milyar Rupiah	2.135.728.584	251 Milyar Rupiah	2.199.800.441	258 Milyar Rupiah	2.265.794.455	1.219 Milyar Rupiah	UPT PPD Madiun	Kab/Kota Madiun	
		3.0.07.39.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Madiun	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	1.834.218.026	2 sertifikat	1.889.244.567	2 sertifikat	1.945.921.904	2 sertifikat	2.004.299.561	2 sertifikat	2.064.428.548	2 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	11 layanan	1.834.218.026	11 layanan	1.889.244.567	11 layanan	1.945.921.904	11 layanan	2.004.299.561	11 layanan	2.064.428.548	11 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.834.218.026	2 dokumen	1.889.244.567	2 dokumen	1.945.921.904	2 dokumen	2.004.299.561	2 dokumen	2.064.428.548	10 dokumen			
		3.0.07.39.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Madiun	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	129.471.000	2 dokumen	133.355.130	2 dokumen	137.355.784	2 dokumen	141.476.457	2 dokumen	145.720.751	10 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	129.471.000	2 dokumen	133.355.130	2 dokumen	137.355.784	2 dokumen	141.476.457	2 dokumen	145.720.751	10 dokumen			
		3.0.07.39.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Madiun	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	49.440.000	2 dokumen	50.923.200	2 dokumen	52.450.896	2 dokumen	54.024.423	2 dokumen	55.645.156	10 dokumen			
		3.0.07.40	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ponorogo	180 milyar rupiah	174 Milyar Rupiah	1.542.942.777	180 Milyar Rupiah	1.589.231.060	186 Milyar Rupiah	1.636.907.993	193 Milyar Rupiah	1.686.015.231	198 Milyar Rupiah	1.736.595.688	931 Milyar Rupiah	UPT PPD Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	
		3.0.07.40.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.431.805.777	1 sertifikat	1.474.759.950	1 sertifikat	1.519.002.749	1 sertifikat	1.564.572.831	1 sertifikat	1.611.510.016	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	6 layanan	1.431.805.777	6 layanan	1.474.759.950	6 layanan	1.519.002.749	6 layanan	1.564.572.831	6 layanan	1.611.510.016	6 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.431.805.777	2 dokumen	1.474.759.950	2 dokumen	1.519.002.749	2 dokumen	1.564.572.831	2 dokumen	1.611.510.016	10 dokumen			
		3.0.07.40.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	56.753.000	1 dokumen	58.455.590	1 dokumen	60.209.258	1 dokumen	62.015.535	1 dokumen	63.876.001	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	56.753.000	2 dokumen	58.455.590	2 dokumen	60.209.258	2 dokumen	62.015.535	1 dokumen	63.876.001	9 dokumen			
		3.0.07.40.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	54.384.000	2 dokumen	56.015.520	2 dokumen	57.695.986	2 dokumen	59.426.865	2 dokumen	61.209.671	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.41	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tulungagung	285 milyar rupiah	284 Milyar Rupiah	1.214.883.841	294 Milyar Rupiah	1.251.330.356	303 Milyar Rupiah	1.288.870.267	313 Milyar Rupiah	1.327.536.375	322 Milyar Rupiah	1.367.362.466	1.516 Milyar Rupiah	UPT PPD Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	
		3.0.07.41.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.089.326.841	1 sertifikat	1.122.006.646	1 sertifikat	1.155.666.846	1 sertifikat	1.190.336.851	1 sertifikat	1.226.046.957	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	7 layanan	1.089.326.841	7 layanan	1.122.006.646	7 layanan	1.155.666.846	7 layanan	1.190.336.851	7 layanan	1.226.046.957	7 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.089.326.841	2 dokumen	1.122.006.646	2 dokumen	1.155.666.846	2 dokumen	1.190.336.851	2 dokumen	1.226.046.957	10 dokumen			
		3.0.07.41.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Tulungagung	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	63.757.000	1 dokumen	65.669.710	1 dokumen	67.639.801	1 dokumen	69.668.995	1 dokumen	71.759.065	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	63.757.000	2 dokumen	65.669.710	2 dokumen	67.639.801	2 dokumen	69.668.995	2 dokumen	71.759.065	10 dokumen			
		3.0.07.41.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Tulungagung	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	61.800.000	2 dokumen	63.654.000	2 dokumen	65.563.620	2 dokumen	67.530.529	2 dokumen	69.556.444	10 dokumen			
		3.0.07.42	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Magetan	139 milyar rupiah	137 Milyar Rupiah	1.568.212.183	141 Milyar Rupiah	1.615.258.548	146 Milyar Rupiah	1.663.716.305	151 Milyar Rupiah	1.713.627.795	155 Milyar Rupiah	1.765.036.627	730 Milyar Rupiah	UPT PPD Magetan	Kabupaten Magetan	
		3.0.07.42.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Magetan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.449.762.183	1 sertifikat	1.493.255.048	1 sertifikat	1.538.052.700	1 sertifikat	1.584.194.281	1 sertifikat	1.631.720.109	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	5 layanan	1.449.762.183	5 layanan	1.493.255.048	5 layanan	1.538.052.700	5 layanan	1.584.194.281	5 layanan	1.631.720.109	5 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.449.762.183	2 dokumen	1.493.255.048	2 dokumen	1.538.052.700	2 dokumen	1.584.194.281	2 dokumen	1.631.720.109	10 dokumen			
		3.0.07.42.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Magetan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	56.650.000	1 dokumen	58.349.500	1 dokumen	60.099.985	1 dokumen	61.902.985	1 dokumen	63.760.074	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	2 dokumen	2 dokumen	56.650.000	2 dokumen	58.349.500	2 dokumen	60.099.985	2 dokumen	61.902.985	2 dokumen	63.760.074	10 dokumen			
		3.0.07.42.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Magetan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	61.800.000	2 dokumen	63.654.000	2 dokumen	65.563.620	2 dokumen	67.530.529	2 dokumen	69.556.444	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.43	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ngawi	138 milyar rupiah	137 Milyar Rupiah	1.651.378.503	141 Milyar Rupiah	1.700.919.858	144 Milyar Rupiah	1.751.947.454	150 Milyar Rupiah	1.804.505.878	153 Milyar Rupiah	1.858.641.054	725 Milyar Rupiah	UPT PPD Ngawi	Kabupaten Ngawi
		3.0.07.43.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Ngawi	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	2 sertifikat	2 sertifikat	1.466.390.503	2 sertifikat	1.510.382.218	2 sertifikat	1.555.693.685	2 sertifikat	1.602.364.495	2 sertifikat	1.650.435.430	2 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	6 layanan	1.466.390.503	6 layanan	1.510.382.218	6 layanan	1.555.693.685	6 layanan	1.602.364.495	6 layanan	1.650.435.430	6 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.466.390.503	2 dokumen	1.510.382.218	2 dokumen	1.555.693.685	2 dokumen	1.602.364.495	2 dokumen	1.650.435.430	10 dokumen		
		3.0.07.43.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	107.738.000	2 dokumen	110.970.140	2 dokumen	114.299.244	2 dokumen	117.728.222	2 dokumen	121.260.068	10 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	107.738.000	2 dokumen	110.970.140	2 dokumen	114.299.244	2 dokumen	117.728.222	2 dokumen	121.260.068	10 dokumen		
		3.0.07.43.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	77.250.000	2 dokumen	79.567.500	2 dokumen	81.954.525	2 dokumen	84.413.161	2 dokumen	86.945.556	10 dokumen		
		3.0.07.44	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Trenggalek	112 milyar rupiah	111 Milyar Rupiah	1.403.485.313	115 Milyar Rupiah	1.445.589.872	118 Milyar Rupiah	1.488.957.569	123 Milyar Rupiah	1.533.626.295	126 Milyar Rupiah	1.579.635.084	593 Milyar Rupiah	UPT PPD Trenggalek	Kabupaten Trenggalek
		3.0.07.44.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.266.083.313	1 sertifikat	1.304.065.812	1 sertifikat	1.343.187.787	1 sertifikat	1.383.483.420	1 sertifikat	1.424.987.923	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	7 layanan	1.266.083.313	7 layanan	1.304.065.812	7 layanan	1.343.187.787	7 layanan	1.383.483.420	7 layanan	1.424.987.923	7 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.266.083.313	2 dokumen	1.304.065.812	2 dokumen	1.343.187.787	2 dokumen	1.383.483.420	2 dokumen	1.424.987.923	10 dokumen		
		3.0.07.44.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Trenggalek	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	63.242.000	1 dokumen	65.139.260	1 dokumen	67.093.438	1 dokumen	69.106.241	1 dokumen	71.179.428	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	63.242.000	2 dokumen	65.139.260	2 dokumen	67.093.438	2 dokumen	69.106.241	2 dokumen	71.179.428	10 dokumen		
		3.0.07.44.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Trenggalek	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	74.160.000	2 dokumen	76.384.800	2 dokumen	78.676.344	2 dokumen	81.036.634	2 dokumen	83.467.733	10 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		3.0.07.45	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pacitan	62 milyar rupiah	61 Milyar Rupiah	1.356.571.955	63 Milyar Rupiah	1.397.269.113	65 Milyar Rupiah	1.439.187.187	68 Milyar Rupiah	1.482.362.802	70 Milyar Rupiah	1.526.833.686	327 Milyar Rupiah	UPT PPD Pacitan	Kabupaten Pacitan	
		3.0.07.45.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pacitan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.263.047.955	1 sertifikat	1.300.939.393	1 sertifikat	1.339.967.575	1 sertifikat	1.380.166.602	1 sertifikat	1.421.571.600	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 layanan	5 layanan	1.263.047.955	5 layanan	1.300.939.393	5 layanan	1.339.967.575	5 layanan	1.380.166.602	5 layanan	1.421.571.600	5 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.263.047.955	2 dokumen	1.300.939.393	2 dokumen	1.339.967.575	2 dokumen	1.380.166.602	2 dokumen	1.421.571.600	10 dokumen			
		3.0.07.45.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	48.204.000	1 dokumen	49.650.120	1 dokumen	51.139.624	1 dokumen	52.673.812	1 dokumen	54.254.027	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	48.204.000	2 dokumen	49.650.120	2 dokumen	51.139.624	2 dokumen	52.673.812	1 dokumen	54.254.027	9 dokumen			
		3.0.07.45.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	45.320.000	2 dokumen	46.679.600	2 dokumen	48.079.988	2 dokumen	49.522.388	2 dokumen	51.008.059	10 dokumen			
		3.0.07.46	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pamekasan	99 milyar rupiah	91 Milyar Rupiah	1.351.813.200	94 Milyar Rupiah	1.392.367.596	97 Milyar Rupiah	1.434.138.623	100 Milyar Rupiah	1.477.162.782	108 Milyar Rupiah	1.521.477.666	485 Milyar Rupiah	UPT PPD Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	
		3.0.07.46.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.236.247.200	1 sertifikat	1.273.334.616	1 sertifikat	1.311.534.654	1 sertifikat	1.350.880.694	1 sertifikat	1.391.407.115	1 sertifikat			
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	5 layanan	1.236.247.200	5 layanan	1.273.334.616	5 layanan	1.311.534.654	5 layanan	1.350.880.694	5 layanan	1.391.407.115	5 layanan			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.236.247.200	2 dokumen	1.273.334.616	2 dokumen	1.311.534.654	2 dokumen	1.350.880.694	2 dokumen	1.391.407.115	10 dokumen			
		3.0.07.46.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	50.058.000	1 dokumen	51.559.740	1 dokumen	53.106.532	1 dokumen	54.699.728	1 dokumen	56.340.720	5 dokumen			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	50.058.000	2 dokumen	51.559.740	2 dokumen	53.106.532	2 dokumen	54.699.728	2 dokumen	56.340.720	10 dokumen			
		3.0.07.46.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	65.508.000	2 dokumen	67.473.240	2 dokumen	69.497.437	2 dokumen	71.582.360	2 dokumen	73.729.831	10 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.0.07.47	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bangkalan	97 milyar rupiah	87 Milyar Rupiah	1.313.160.277	90 Milyar Rupiah	1.352.555.085	92 Milyar Rupiah	1.393.131.737	95 Milyar Rupiah	1.434.925.689	97 Milyar Rupiah	1.477.973.460	461 Milyar Rupiah	UPT PPD Bangkalan	Kabupaten Bangkalan
		3.0.07.47.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.191.311.277	1 sertifikat	1.227.050.615	1 sertifikat	1.263.862.133	1 sertifikat	1.301.777.997	1 sertifikat	1.340.831.337	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	6 layanan	1.191.311.277	6 layanan	1.227.050.615	6 layanan	1.263.862.133	6 layanan	1.301.777.997	6 layanan	1.340.831.337	6 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.191.311.277	2 dokumen	1.227.050.615	2 dokumen	1.263.862.133	2 dokumen	1.301.777.997	2 dokumen	1.340.831.337	10 dokumen		
		3.0.07.47.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	50.779.000	1 dokumen	52.302.370	1 dokumen	53.871.441	1 dokumen	55.487.584	1 dokumen	57.152.212	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	50.779.000	2 dokumen	52.302.370	2 dokumen	53.871.441	2 dokumen	55.487.584	2 dokumen	57.152.212	10 dokumen		
		3.0.07.47.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	71.070.000	2 dokumen	73.202.100	2 dokumen	75.398.163	2 dokumen	77.660.108	2 dokumen	79.989.911	10 dokumen		
		3.0.07.48	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sampang	58 milyar rupiah	52 Milyar Rupiah	1.032.786.974	53 Milyar Rupiah	1.063.770.583	55 Milyar Rupiah	1.095.683.701	57 Milyar Rupiah	1.128.554.211	58 Milyar Rupiah	1.162.410.838	275 Milyar Rupiah	UPT PPD Sampang	Kabupaten Sampang
		3.0.07.48.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sampang	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	924.327.974	1 sertifikat	952.057.813	1 sertifikat	980.619.548	1 sertifikat	1.010.038.134	1 sertifikat	1.040.339.278	1 sertifikat		
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	3 layanan	4 layanan	924.327.974	4 layanan	952.057.813	4 layanan	980.619.548	4 layanan	1.010.038.134	4 layanan	1.040.339.278	4 layanan		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	924.327.974	2 dokumen	952.057.813	2 dokumen	980.619.548	2 dokumen	1.010.038.134	2 dokumen	1.040.339.278	10 dokumen		
		3.0.07.48.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sampang	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	51.603.000	1 dokumen	53.151.090	1 dokumen	54.745.623	1 dokumen	56.387.991	1 dokumen	58.079.631	5 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	51.603.000	2 dokumen	53.151.090	2 dokumen	54.745.623	2 dokumen	56.387.991	2 dokumen	58.079.631	10 dokumen		
		3.0.07.48.003	Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT PPD Sampang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	56.856.000	2 dokumen	58.561.680	2 dokumen	60.318.530	2 dokumen	62.128.086	2 dokumen	63.991.929	10 dokumen		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		3.0.07.49	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah UPT PPD Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sumenep	84 milyar rupiah	77 Milyar Rupiah	1.286.406.758	80 Milyar Rupiah	1.324.998.961	82 Milyar Rupiah	1.364.748.930	84 Milyar Rupiah	1.405.691.398	86 Milyar Rupiah	1.447.862.139	409 Milyar Rupiah	UPT PPD Sumenep	Kabupaten Sumenep		
		3.0.07.49.001	Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik dan Sosialisasi Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep	Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	1 sertifikat	1 sertifikat	1.114.705.758	1 sertifikat	1.148.146.931	2 sertifikat	1.182.591.339	sertifikat	1.218.069.079	1 sertifikat	1.254.611.151	1 sertifikat				
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	4 layanan	1.114.705.758	4 layanan	1.148.146.931	4 layanan	1.182.591.339	4 layanan	1.218.069.079	4 layanan	1.254.611.151	4 layanan				
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	12 dokumen	2 dokumen	1.114.705.758	2 dokumen	1.148.146.931	2 dokumen	1.182.591.339	2 dokumen	1.218.069.079	2 dokumen	1.254.611.151	10 dokumen				
		3.0.07.49.002	Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT PPD Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	1 dokumen	49.337.000	1 dokumen	50.817.110	1 dokumen	52.341.623	1 dokumen	53.911.872	1 dokumen	55.529.228	5 dokumen				
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	-	2 dokumen	49.337.000	2 dokumen	50.817.110	2 dokumen	52.341.623	2 dokumen	53.911.872	2 dokumen	55.529.228	10 dokumen				
		3.0.07.49.003	Penyelenggaraan Operasi Operasi Bersama di UPT Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	96 dokumen	2 dokumen	122.364.000	2 dokumen	126.034.920	2 dokumen	129.815.968	2 dokumen	133.710.447	2 dokumen	137.721.760	10 dokumen				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan				Nilai Rata-rata SKM	87,90 nilai		87,84		87,89 nilai		87,94 nilai		87,99 nilai		87,99 nilai					
				Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,58 %		88,63		88,68 %		88,73 %		88,78 %		88,78 %					
				Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	51,42 %		51,47		51,52 %		51,57 %		51,62 %		51,62 %					
		3.0.07.55	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penurunan Temuan SPI	5,3%	5,0%	2.155.896.126	4,95%	2.220.573.010	4,90%	2.287.190.201	4,85%	2.355.805.906	4,80%	2.426.480.084	4,80%	Bidang Pengendalian & Pembinaan	Jawa Timur		
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100%	100%	2.155.896.126	100%	2.220.573.010	100%	2.287.190.201	100%	2.355.805.906	100%	2.426.480.084	100%				
		3.0.07.55.001	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	2 dokumen	351.569.900	2 dokumen	362.116.997	2 dokumen	372.980.507	2 dokumen	384.169.922	2 dokumen	395.695.020	10 dokumen				
				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	70 dokumen	70 dokumen	351.569.900	70 dokumen	362.116.997	70 dokumen	372.980.507	70 dokumen	384.169.922	70 dokumen	395.695.020	350 dokumen				
		3.0.07.55.002	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pendapatan Daerah	70 dokumen	70 dokumen	867.068.363	70 dokumen	893.080.414	70 dokumen	919.872.827	70 dokumen	947.469.011	70 dokumen	975.893.082	350 dokumen				
		3.0.07.55.003	Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi	70 dokumen	70 dokumen	937.257.863	70 dokumen	965.375.599	70 dokumen	994.336.867	70 dokumen	1.024.166.973	70 dokumen	1.054.891.982	350 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2020		2021		2022		2023		2024							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		3.0.07.54	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Layanan yang Bersertifikat	91%	93%	2.111.974.367	94	2.175.409	2.175.333.597	95%	2.240.593.605	96%	2.307.811.413	97	%	2.377.045.756	97	%	Bidang Pajak Daerah	Jawa Timur
		3.0.07.54.001	Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan	Jumlah Dokumen Sertifikasi	3 dokumen/sertifikat	2 dokumen/sertifikat	59.286.800	2	61065404	61.065.404	2 dokumen/sertifikat	62.897.366	2 dokumen/sertifikat	64.784.287	2 dokumen/sertifikat	66.727.816	2 dokumen/sertifikat				
		3.0.07.54.002	Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi	3 dokumen	10 dokumen	2.052.687.567	10	2.114E+09	2.114.268.193	10 dokumen	2.177.696.239	10 dokumen	2.243.027.126	10 dokumen	2.310.317.940	50	dokumen			
		3.0.07.56	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di Seluruh Jawa Timur	16 jam/tahun	36 jam	3.215.943.960	35 jam	4.093.887.656	34 jam	4.998.692.931	33 jam	5.931.191.797	32 jam	6.892.242.533	32 jam		Bidang Perencanaan & Pengembangan	Jawa Timur		
		3.0.07.56.001	Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	2 dokumen	2 dokumen	267.365.340	2 dokumen	280.733.607	2 dokumen	294.770.287	2 dokumen	309.508.802	2 dokumen	324.984.242	10	dokumen				
		3.0.07.56.002	Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi	3 dokumen	3 dokumen	255.903.500	3 dokumen	268.698.675	3 dokumen	282.133.609	3 dokumen	296.240.289	3 dokumen	311.052.304	15	dokumen				
		3.0.07.56.003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Jaringan	18 paket	23 paket	1.787.260.120	23 paket	1.840.877.924	23 paket	1.896.104.261	23 paket	1.952.987.389	23 paket	2.011.577.011	115	paket				
				Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung	2 paket	2 paket	1.787.260.120	2 paket	1.840.877.924	2 paket	1.896.104.261	2 paket	1.952.987.389	2 paket	2.011.577.011	10	paket				
		3.0.07.56.004	Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Software Pendukung Layanan	2 paket	5 paket	905.415.000	5 paket	1.703.577.450	5 paket	2.525.684.774	5 paket	3.372.455.317	5 paket	4.244.628.976	25	paket				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2020		2021		2022		2023		2024								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,05	nilai		80,1	nilai		80,15	nilai		80,20	nilai		80,25	nilai			
		3.0.07.50	Program Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	-	100%	1.046.188.510	100%	1.077.574.165	100%	1.109.901.390	100%	1.143.198.432			1.177.494.385	100%			Bidang Perencanaan & Pengembangan	Jawa Timur	
		3.0.07.50.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	7 dokumen	779.264.010	7 dokumen	802.641.930	7 dokumen	826.721.188	7 dokumen	851.522.824	7 dokumen	877.068.509	35	dokumen					
		3.0.07.50.002	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	6 dokumen	6 dokumen	266.924.500	6 dokumen	274.932.235	6 dokumen	283.180.202	6 dokumen	291.675.608	6 dokumen	300.425.876	30	dokumen					
		3.0.07.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi anggaran	-	100%	117.486.329.696	100%	116.434.475.559	100%	115.931.919.462	100%	113.857.842.286	100%	120.644.679.154	100%					Sekretariat	Jawa Timur
				Indeks profesionalitas ASN		87,47	nilai		87,52	nilai		87,57	nilai		87,62	nilai						
		3.0.07.01.001	Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan	13 dokumen	13 dokumen	273.465.000	13 dokumen	281.668.950	13 dokumen	290.119.019	13 dokumen	298.822.589	13 dokumen	307.787.267	65	dokumen					
		3.0.07.01.002	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	-	1	37.981.403.603	1	35.199.491.504	1	32.928.077.501	1	29.045.440.517	1	33.983.091.889	5	dokumen					
		3.0.07.01.003	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Tersedia	50 paket	234	13.722.479.056	234	14.134.153.428	234	14.558.178.031	234	14.994.923.371	234	15.444.771.073	1.170	paket					
		3.0.07.01.004	Ketatausahaan dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	96 paket	260	65.508.982.037	260	66.819.161.677	260	68.155.544.911	260	69.518.655.809	260	70.909.028.925	1.300	paket					
			<b>JUMLAH</b>				<b>188.776.326.750</b>		<b>191.595.656.300</b>		<b>194.571.408.800</b>		<b>199.871.557.800</b>		<b>207.198.761.700</b>							



Tabel 6.2

**PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG NAWA BHAKTI**

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PD	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
<b>Bhakti 8 : Jatim Amanah “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anto Korupsi”</b>	Pendapatan Pajak dan Retribusi	<b>Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah</b>	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
			Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	
			Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bapenda Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan PAD, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2019-2024 adalah untuk menunjang tercapainya Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**.

Implementasi Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Visi tersebut mendukung Misi Ketiga yaitu **“Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan”** yang dijabarkan melalui rumusan Tujuan dan Sasaran pada BAB IV Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan Indikator Kinerja Bapenda Provinsi Jawa Timur, sebagai alat ukur untuk memantau tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian rumusan Tujuan dan Sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Rumusan Tujuan Badan Pendapatan Daerah provinsi Jawa Timur, mengacu sesuai dengan rumusan Sasaran pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu **“ Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah”** dengan Indikator Persentase PAD terhadap Total Pendapatan yang ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Provinsi Jawa Timur

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	-	-	46,71%	47,33%	47,87%	48,45%	49,14%	49,14%

Indikator Tujuan tersebut berguna untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan kinerja penerimaan PAD yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama pelaksanaan tugas dan untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2019-2024, serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2019-2024.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2019-2024 serta tugas dan fungsi, maka Bapenda Provinsi Jawa Timur berperan dalam mengimplementasikan Misi Kelima. Sehingga Tujuan Bapenda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, yaitu: “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”, dengan Sasaran sebagai berikut: (1) Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mendukung ketiga sasaran tersebut maka ditentukan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Provinsi Jawa Timur diantaranya: (1) Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah; (2) Nilai Rata-rata SKM; (3) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; (4) Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan; (5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renstra Bapenda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan serta menjadi acuan dalam proses perencanaan Bapenda Provinsi Jawa Timur secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**BOEDI PRIJO SOEPRAJITNO, SH. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600812 198603 1 026